

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi sangat berharga untuk suatu bangsa karena menunjukkan kondisi perekonomiannya mengalami kemajuan ke kondisi yang lebih baik dan bertahan dalam jangka waktu tertentu (Dr. Suparman, SE., 2022) Dalam konteks lain, pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai kenaikan pembuatan produk dan layanan ekonomi dari satu rentang waktu ke rentang waktu lain. Perkembangan ekonomi umumnya diukur dengan peningkatan skor pasar agregat dari tambahan produk dan layanan yang dibuat atau perhitungan ke bentuk barang Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator pengukuran (Widarni & Bawono, 2021). Pertumbuhan ekonomi perlu diketahui oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah wilayah. Faktor ini disebabkan pemerintah ialah pihak yang menyusun kebijakan mengenai perencanaan pendapatan, belanja, dan pembangunan di masa yang akan datang (León-Gómez et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi juga diyakini memberikan dampak pada pergeseran struktur ekonomi (Alfarabi dkk., 2014). Kontribusi industri dan layanan kepada PDB dan penerimaan atau penggunaan sumber daya manusia masing-masing mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang menunjukkan adanya perubahan komposisi perekonomian. Yang dimaksud dengan “transformasi struktur ekonomi” adalah pergerakan

penyumbang PDB terbesar dari bidang pertanian menuju sektor industri atau jasa. Menurut Ikhsan dkk. (2021), diperkirakan terjadi peralihan tenaga kerja dari bidang pertanian ke sektor industri dan jasa, yang masing2 sektor terkait dengan peningkatan produktivitas, seiring dengan perubahan struktural yang dialami negara-negara berkembang dalam perekonomiannya.

Pada tahun 2022, pertumbuhan PDB semakin menunjukkan adanya transformasi struktural ekonomi yang tersedia di Indonesia. Menurut informasi yang tersedia dan dirilis oleh Biro Pusat Statistik (2023), pertumbuhan PDB terbesar diraih oleh sektor jasa, yang meliputi sektor perdagangan dan reparasi mengalami pertumbuhan PDB sebesar 5,52%, sektor transportasi dan pergudangan meraih pertumbuhan PDRB mencapai 19,87%, serta sektor jasa lainnya yang meraih pertumbuhan PDB sebesar 5,26%. Sektor industri merupakan sektor kedua yang mempunyai pertumbuhan PDB terbesar setelah sektor jasa, yang meliputi sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,38% dan sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,89%. Sementara itu, sektor pertanian justru menjadi sektor dengan pertumbuhan PDB terendah dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, yakni sebesar 2,25%.

Aspek penting lainnya yang menandakan adanya transformasi struktural di suatu negara adalah dari sisi ketenagakerjaan (Rinaldi et al., 2022). Salah satu permasalahan besar di Indonesia adalah

ketenagakerjaan. Pasal 27 ayat kedua Konstitusi Republik Indonesia 1945 mengatur bahwasanya tiap orang memiliki hak untuk pekerjaan dan kehidupan yang sepadan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) kedelapan, yang menyerukan perkembangan keuangan yang lebih inklusi dan berlanjutan, peluang pekerjaan yang komprehensif dan produktif, serta pekerjaan yang memadai bagi semua, sejalan sama misi ini. Tahun 2030 adalah tahun dimana SDGs seharusnya tercapai.

Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa 48,44% pekerja pada Februari 2022 bekerja di industri jasa. Pada bulan Februari 2021, persentase ini turun dari 49,14% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada Februari 2022, persentase pekerja di industri pertanian tumbuh menjadi 29,96% dari tahun sebelumnya sebesar 29,58%. Pada Februari 2022, persentase pekerja sektor industri meningkat sebesar 0,33 poin persentase dari tahun sebelumnya menjadi 21,59%. Hasil individu yang bekerja dalam bidang industri pada Februari 2022 meningkat berjumlah 1,41 juta orang dibandingkan Februari 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas pabrik seiring dengan pemulihan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

Menurut (Kotler, 2009), jasa pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang tidak berwujud dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengakibatkan peralihan hak milik. Salah satu industri yang berharga di banyak bangsa, satunya Indonesia, adalah

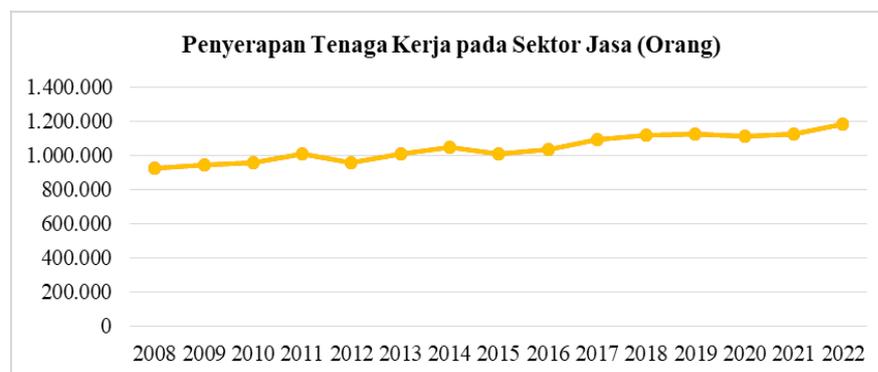
bidang jasa. Di Indonesia, industri jasa mempekerjakan lebih dari 35% angkatan kerja dan menyumbang lebih dari 45% nilai tambah perekonomian. Sektor jasa penting bagi semua kegiatan perekonomian, tidak hanya PDB dan angka tenaga kerja (Kambono et al., 2024).

Menurut studi Bank Dunia yang dimuat dalam (Kambono et al., 2024), tingkat ketidakpastian pengiriman yang tinggi menyumbang sekitar 44% dari biaya logistik, sehingga memaksa perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran inventaris mereka. Selain itu, sektor transportasi tetap menyumbang melebihi dari 25% PDB, namun di banyak bangsa ASEAN lainnya, sektor ini hanya menyumbang 10% hingga 15%. Meningkatnya kompetitivitas industri dan barang yang diekspor sangat bergantung pada bidang jasa. Sektor jasa juga penting ke upaya penanggulangan kemiskinan dan distribusi kualitas di bidang logistik dan penyampaian yang akan menurunkan perbedaan mata uang di bagai wilayah Indonesia.

Putri dkk. (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur, sektor jasa telah muncul sebagai penggerak utama perekonomian dalam beberapa waktu terakhir. Industri jasa menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi jangka panjang, seperti yang terlihat dari perkembangan cepat dalam ilmu pengetahuan dan alat. Proses transformasi struktural perekonomian yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dipercepat dengan kebijakan pemerintah yang mendorong sektor jasa, sehingga bidang

jasa kini menggenggam peran berharga ke pertumbuhan ekonomi lokal. Keadaan serapan tenaga kerja di Kota Surabaya yang juga merupakan pusat administratif provinsi wilayah dengan tingkat penyerapan angkatan kerja utama di Jawa Timur menunjukkan semakin mendominasinya bidang jasa. Tren penerimaan atau penggunaan sumber daya manusia pada bidang jasa di Kota Surabaya selama tahun 2008–2022 bisa dilihat di Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Grafik penyerapan tenaga kerja sektor jasa Kota Surabaya



Sumber : Bps Kota Surabaya 2022, data diolah.

Menurut Gambar 1.1, keseluruhan pekerja yang bekerja ke bidang jasa di Kota Surabaya secara keseluruhan mengalami fluktuasi atau jumlah yang tidak menunjukkan peningkatan ataupun penurunan. Namun selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020–2022, hasil pekerja yang beroperasi ke bidang jasa di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Namun, jumlah penerimaan atau penggunaan sumber daya manusia sektor jasa di tahun 2020 mengakibatkan turunan dibanding tahun 2018 dan 2019. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup masif

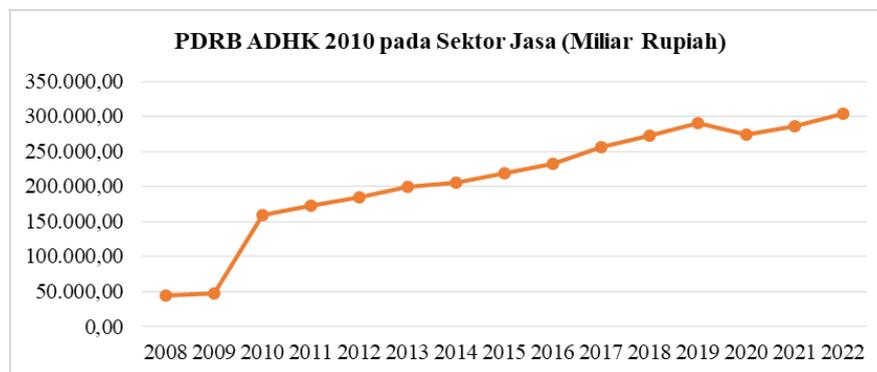
akibat lemahnya perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Ketika Indonesia menerapkan kebijakan normal baru, penyerapan tenaga kerja terlihat mulai meningkat di tahun 2021 juga 2022. Tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian hasil tenaga kerja tertinggi yang diserap oleh sektor jasa di Kota Surabaya, yaitu sebanyak 1.178.970 orang.

Tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa rupanya memberikan angin segar pada tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Di tahun 2022, angka tidak bekerja kebuka sebesar 7,62% mengakibatkan turunan sebesar 2,06% dibandingkan tahun 2021 (BPS, Kota Surabaya 2022). Beberapa akibat yang membuat penerimaan tenaga kerja pada bidang jasa di Kota Surabaya yang perlu diteliti. Salah satu upaya untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Surabaya adalah dengan memahami akibat yang membuat penyerapan tenaga kerja sektor jasa yang kini menjadi sektor yang mendominasi ketenagakerjaan di Kota Surabaya.

Skor meningkat dari penciptaan produk dan layanan yang dapat dibuat dari beragam aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau wilayah diketahui dengan barang domestik regional bruto atau PDB (Saberan, 2002). Penerimaan tenaga kerja pada bidang layanan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan skor PDRB industri jasa Surabaya. Faktor ini sama dengan konsepsi Keynesian yang mengajukan bahwa perubahan pasar produk tentu mempengaruhi pasar tenaga kerja. Fungsi produksi, menurut Boediono (2018), berpendapat bahwa menggunakan lebih banyak input—terutama

tenaga kerja—adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi. Permintaan suatu perekonomian terhadap suatu barang dan jasa akan menentukan besarnya produksi yang harus dihasilkan, yang selanjutnya akan mempengaruhi pemanfaatan input (tenaga kerja). Pola pertumbuhan PDRB Kota Surabaya selama tahun 2008–2022 dapat diamati pada

Gambar 1. 2 Grafik PDRB Sektor Jasa Kota Surabaya



Sumber : Bps Kota Surabaya 2022, data diolah.

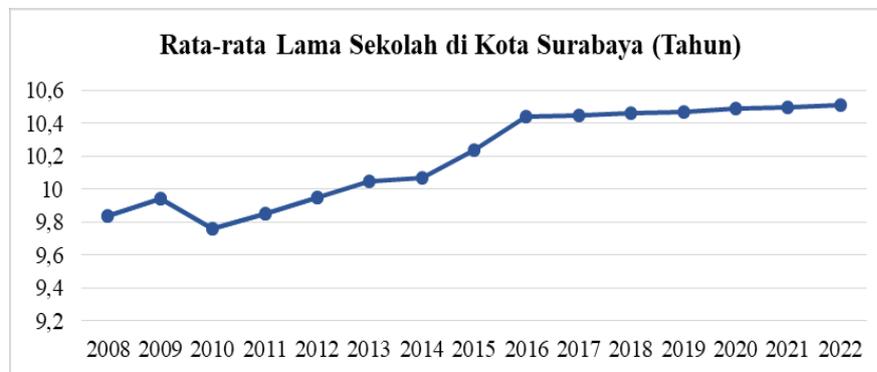
PDRB sektor jasa yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil penjumlahan PDRB pada lapangan usaha G hingga U. Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat adanya peningkatan PDRB pada sektor jasa di Kota Surabaya selama tahun 2008–2022. Penurunan PDRB sektor jasa hanya terjadi pada tahun 2020 yang merupakan imbas dari melemahnya kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun selanjutnya, kondisi ekonomi Kota Surabaya berangsur-angsur pulih hingga berpengaruh pada kembali naiknya PDRB. PDRB sektor jasa tertinggi mampu dicapai oleh Kota Surabaya pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp304.133,19 miliar.

Ikatan dengan PDRB dan penerimaan tenaga kerja telah dibuktikan pada beberapa studi lalu. Studi yang dilaksanakan oleh (Pangesti & Prawoto, 2018) mengemukakan bahwa Produktivitas Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak positif dan penting terhadap penyerapan angkatan kerja. Berbeda halnya dengan jawaban studi Amanah (2019) & Lube et al. (2021), yang menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh bermakna kepada penerimaan angkatan kerja. Sementara itu, penelitian Putri & Soelistyo (2018) mengindikasikan menyatakan bahwa PDRB memiliki dampak merugikan dan berharga kepada penerimaan angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait hubungan antara PDRB dan penerimaan angkatan kerja.

Satu komponen penting dalam penerimaan angkatan kerja ialah pendidikan. Salah satu prioritas pembangunan yang berkelanjutan adalah edukasi dalam usaha untuk membangun mutu tenaga manusia (Syuli Mamoto, Daisy S.M. Engka, 2023). Seseorang dapat mengakibatkan perkembangan dari metode pendidikan yang dapat diterima jika memiliki akses terhadap bentuk-bentuk kognitif, seperti memperoleh pendidikan yang layak, bagaimana tercatat di UU No 20 Tahun 2003. sebelumnya telah ada dalam format yang cocok dari sudut pandang spiritual, kepercayaan, diri. Kontrol, wanian, kepintaran, moral yang baik. dan kemampuan untuk bersiap menghadapi dunia kerja. Hal ini juga bermanfaat bagi lingkungan dan bangsa.

Menurut penelitian Russianti dkk. (2023), rendahnya kualitas tenaga kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk diidentifikasi sebagai permasalahan terkait tingkat pendidikan di tempat kerja. Lebih buruk lagi, angkatan kerja pada tingkat pendidikan ini sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai. Menurut Basir (2012), hal ini terjadi akibat terkonsentrasinya tenaga terdidik pada satu daerah yang tidak sinkron dengan sektor perekonomian yang ada. Oleh karena itu, banyak pekerja yang terpaksa bekerja pada industri yang tidak sejalan dengan sejarah pendidikannya dan menerima upah yang tidak sesuai sama tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan tercermin dari rata-rata lama sekolah, yang dapat diamati pada

Gambar 1. 3 Grafik Tingkat Pendidikan Kota Surabaya



Sumber : Bps Kota Surabaya 2022, data diolah.

Rata-rata lama sekolah atau pendidikan yang diselesaikan masyarakat menunjukkan tingkat pendidikan. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hingga 2022, rata-rata waktu bersekolah yang dihabiskan warga Surabaya akan meningkat. Baru pada tahun 2010 rata-rata lama bersekolah turun antara tahun 2008

dan 2022. Tahun 2022 merupakan tahun rata-rata lama bersekolah terlama yang pernah tercatat, yaitu 10,51 tahun. Jumlah tersebut telah mencapai target wajib pendidikan sembilan tahun, namun belum mencapai target pendidikan dua belas tahun. Meski merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur, mayoritas masyarakat yang tinggal di Kota Surabaya masih belum mengenyam pendidikan 12 tahun seperti yang dianjurkan pemerintah.

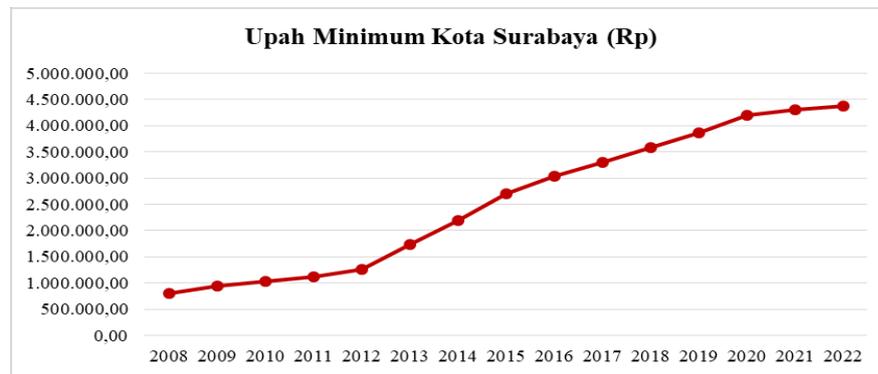
Kaitan dengan tingkat jenjang dan penyerapan tenaga kerja telah dibuktikan pada beberapa penelitian terdahulu. Studi yang dilaksanakan sama (Silalahi et al., 2023) dan (Rusianti et al., 2023) mengindikasikan bahwa tahap jenjang memiliki dampak baik dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Berbeda halnya dengan jawaban studi (Hasmawati et al., 2021) dan (Syuli Mamoto, Daisy S.M. Engka, 2023) yang menunjukkan bahwa taraf pendidikan tidak berdampak penting pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, studi yang dilaksanakan sama Putri & Shofwan (2022) mengindikasikan bahwa taraf jenjang berdampak negatif dan berarti kepada penyerapan tenaga kerja. Ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait ikatan dengan taraf jenjang dan penerimaan angkatan kerja.

Selain PDRB dan pencapaian pendidikan, upah juga mempunyai dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendorong utama di balik keputusan seseorang untuk berupaya memenuhi kebutuhannya dan menjalani kehidupan yang sejahtera adalah biaya

hidup. Oleh karena itu, memperbaiki struktur upah melalui peraturan upah minimum adalah salah satu cara pemerintah mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja. Pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan pengupahan tanah sama dengan UU No 6 Tahun 2023, Pasal 88 Ayat 2, dalam upaya memenuhi hak pekerja dan buruh atas pengupahan yang layak bagi seluruh rakyat. Kebijakan ini berbentuk upah minimum tahunan. Gaji Minimal Provinsi dan Gaji Minimal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh gubernur.

Tingkat upah atau kompensasi dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan produktivitas kerja (Boedirochminarni, 2018; Nofrita & Marwan, 2022) Gregory & Zierahn (2022) menjelaskan bahwa karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih besar kemungkinannya untuk dibayar lebih. Imbalan yang diberikan perusahaan memengaruhi harga produk dan kesempatan kerja. Semakin besar imbalannya, semakin tinggi harga produk dan kesempatan kerja yang tersedia. (Hartono et al., 2018). Perubahan UMK Kota Surabaya selama tahun 2008–2022 dapat diamati pada

Gambar 1. 4 Grafik UMK Kota Surabaya



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2022)

Menurut Gambar 1.4, Upah Minimum Kota Surabaya terlihat terus mengalami peningkatan selama tahun 2008–2022, bahkan peningkatan antara UMK pada tahun 2008 dan 2022 sangat signifikan hingga 5 kali lipat. UMK tertinggi di Kota Surabaya dirasakan pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp4.375.479,19. Merdekawaty et al. (2016) menuturkan bahwa Peningkatan dalam skor pokok Hidup layak (KHL) dan Indeks Harga pembeli (IHK). membuat besaran UMK terus meningkat. Pemerintah meningkatkan upah minimum dengan tujuan untuk tetap menjamin kesejahteraan pekerja.

Ikatan dengan gaji minimal dan penerimaan angkatan kerja telah dibuktikan pada beberapa penelitian terdahulu. Studi yang dilaksanakan sama (Nofrita & Marwan, 2022) menyatakan bahwa upah minimum memiliki dampak yang baik dan berharga pada penerimaan angkatan kerja. Berbeda halnya sama jawaban studi (Hartono et al., 2018) dan Amanah (2019), yang menyiratkan bahwa gaji minimal tidak mempunyai dampak yang berharga pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, studi (Pangesti & Prawoto,

2018) dan Putri & Soelistyo (2018) mengindikasikan kalo gaji minimal berdampak buruk dan penting kepada penyerapan tenaga kerja. Ini memperlihatkan kalau adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait ikatan dengan gaji minimal dan penerimaan angkatan kerja.

Studi mengenai dampak barang Domestik Regional Bruto, tingkat pendidikan, dan gaji kepada penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa di Kota Surabaya memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDRB menjadi indikator penting karena mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi sektor jasa sebagai salah satu penyumbang signifikan terhadap PDRB. Tingkat pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas tenaga kerja, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana pendidikan mempengaruhi kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor jasa. Sementara itu, upah menjadi faktor penentu daya tarik sektor jasa sebagai pilihan pekerjaan, sehingga analisis terhadap ikatan dengan upah dengan penerimaan angkatan kerja bisa memberikan pemahaman mendalam terkait keberlanjutan dan kemampuan bersaing sektor jasa di Kota Surabaya. Dengan memahami interaksi kompleks antara PDRB, tingkat pendidikan, dan upah, studi ini bisa berikan dasar untuk pengambilan kebijakan yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor jasa,

sekaligus penerimaan angkatan kerja pada bidang layanan di Kota Surabaya.

Dari uraian sebelumnya, jadi peneliti terpikat untuk melaksanakan studi dengan nama, **“Analisis Pengaruh PDRB Sektor Jasa, Tingkat Pendidikan, dan Upah Terhadap Penyerapan tenaga Kerja Sektor Jasa di Kota Surabaya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari konteks yang sudah dipaparkan, jadi rumusan faktor pada penelitian ini ialah.

1. Apakah ada pengaruh antara PDRB sektor jasa kepada penyerapan tenaga kerja sektor jasa?
2. Apakah ada pengaruh antara Tingkat Pendidikan kepada penyerapan tenaga kerja sektor jasa?
3. Apakah ada pengaruh antara upah kepada penyerapan tenaga kerja sektor jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pengantar dan perumusan masalah sebelumnya, jadi pada target penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara PDRB sektor Jasa kepada penyerapan tenaga kerja pada sektor Jasa di Kota Surabaya.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Tingkat Pendidikan kepada penyerapan tenaga kerja pada sektor Jasa di Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara upah kepada penyerapan tenaga kerja pada sektor Jasa di Kota Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan data variable yang dipaparkan di latar belakang, maka ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Dalam penelitian ini mencakup data (time series) periode 2008-2022 pada kota Surabaya
2. Pengetahuan yang dipakai ke penelitian ini didasarkan pada informasi BPS kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada hasil tenaga kerja penduduk berumur 15 tahun berdasarkan bidang pekerjaan di kota Surabaya yang memperoleh pengaruh dari barang Domestik Regional Bruto (PDRB , Tingkat Pendidikan, dan Upah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini haruskan memiliki kebaikan, bagus di bidang akademis ataupun mudah. Keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Surabaya penelitian ini diharuskan bisa digunakan untuk peningkatan data dan masukan bagi institusi

terhubung yang terlibat di dalam perumusan kebijakan pertumbuhan bidang Jasa di kota Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

1. Temuan studi ini dimaksudkan agar membantu studi mempelajari lebih lanjut hal bagaimana pembuatan di Surabaya dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan sektor jasa.
2. Sebagai tambahan sumber informasi dan pemahaman siswa lain serta sebagai pedoman penyelidikan lebih lanjut.
3. Mempraktikkan konsep dan ilmu yang diperoleh di tempat perkuliahan serta membandingkannya dengan keadaan sebenarnya di lapangan.